

## **Partnership For The Goals: Utang, Investasi, dan Bantuan Luar Negeri (Kontroversi dan Peluang)**

**Islah Sahbana Kudadiri<sup>1</sup>, Rahmi Sekar Andhini<sup>2</sup>, Syarifah Hannum Pohan<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Corresponding Author: [islahkudadiri@gmail.com](mailto:islahkudadiri@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [rahmiskarandhini@gmail.com](mailto:rahmiskarandhini@gmail.com)<sup>2</sup>, [syarifahhannumpohan30@gmail.com](mailto:syarifahhannumpohan30@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### **Info Artikel**

**Submitted:** 06 Januari 2026

**Revised :** 09 Januari 2026

**Accepted:** 13 Januari 2026

**Published:** 17 Januari 2026

**Keywords:** Partnership for the Goals, foreign debt, foreign investment, foreign aid, sustainable development, SDGs.

**Kata Kunci:** Partnership for the Goals, utang luar negeri, investasi asing, bantuan luar negeri, pembangunan berkelanjutan, SDGs.

---

### **Abstract**

*This study examines Partnership for the Goals, namely Sustainable Development Goal 17, with a focus on the role of foreign debt, foreign investment, and foreign aid in supporting sustainable development in Indonesia. These three instruments function as sources of funding and channels for international cooperation, but they can also lead to economic dependence and power imbalances between donor countries and recipient countries. This study employs a descriptive quantitative approach by distributing questionnaires to 23 respondents in Medan City who have an understanding of global partnerships, development, and economic issues. The results show that the majority of respondents perceive foreign debt, foreign investment, and foreign aid as important tools for accelerating development, as long as they are managed transparently, beneficially, and in line with national interests. Respondents also emphasize the importance of maintaining a balance between the benefits and risks of these three instruments to prevent prolonged economic dependence. Furthermore, respondents' perceptions of global partnerships (SDG 17) indicate a positive attitude toward international cooperation that focuses on technology transfer, innovation, and inclusive growth, while still emphasizing the importance of national economic self-reliance. Therefore, this study concludes that Partnership for the Goals will only be successful if implemented within a framework of good governance, the principle of equality, and a shared commitment to achieving fair and sustainable development..*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang Partnership for the Goals, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17, dengan fokus pada peran utang dari luar negeri, investasi asing, dan bantuan dari luar negeri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ketiga instrumen tersebut berfungsi sebagai sumber dana dan saluran kerja sama internasional, tetapi juga bisa menyebabkan ketergantungan ekonomi serta ketidakseimbangan kekuasaan antara negara pemberi bantuan dan negara penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengirimkan kuesioner kepada 23 responden di Kota Medan yang memahami isu kemitraan global, pembangunan, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden melihat utang luar negeri, investasi asing, dan bantuan luar negeri sebagai alat penting untuk mempercepat pembangunan, selama dikelola secara transparan, bermanfaat, dan sesuai dengan kepentingan negara. Responden juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko ketiga instrumen tersebut agar tidak menyebabkan ketergantungan ekonomi yang terlalu lama. Selain itu, persepsi responden terhadap kemitraan global (SDG 17) menunjukkan sikap positif terhadap kerja sama internasional yang fokus pada transfer teknologi, inovasi, dan pertumbuhan yang inklusif, namun tetap menekankan pentingnya

---

kemandirian ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini menyatakan bahwa Partnership for the Goals hanya akan berhasil jika dilaksanakan dalam kerangka tata kelola yang baik, prinsip kesetaraan, serta komitmen bersama untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

---



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

***Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara***

---

## **Pendahuluan**

Dalam konteks pembangunan nasional dan internasional, kerja sama ekonomi internasional melalui mekanisme utang luar negeri, investasi asing langsung (FDI), dan bantuan luar negeri telah menjadi bagian integral dari strategi pengembangan negara-negara berkembang. Di tengah peluang yang ditawarkan, terdapat pula tantangan dan risiko yang serius, termasuk ketergantungan ekonomi yang berlebihan, pelemahan kemandirian negara dalam menyusun kebijakan ekonomi, ketidakadilan distribusi manfaat, serta potensi terjadinya praktik neo kolonialisme ekonomi. Selain itu, ketidakpastian global, ketidakjelasan syarat politik dan ekonomi yang sering menyertai pinjaman dan bantuan, serta lemahnya tata kelola dan transparansi di tingkat domestik menjadi hambatan utama dalam optimalisasi manfaat kerja sama internasional ini. Sebaliknya, faktor pendukung yang meliputi komitmen global terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), tata kelola yang baik, potensi sumber daya alam dan manusia, serta diplomasi ekonomi yang efektif turut berperan sebagai daya dorong agar kerja sama tersebut dapat berjalan secara adil, produktif, dan berkelanjutan. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan komitmen global untuk membangun dunia yang berkeadilan, sejahtera, dan berkelanjutan. Dari 17 tujuan yang tercantum dalam agenda tersebut, tujuan ke-17 yaitu Partnership for the Goals memiliki peran penting sebagai fondasi kerja sama antara negara maju dan negara berkembang guna memastikan tercapainya seluruh target pembangunan. Dalam konteks ini, utang luar negeri, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), serta bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance/ODA) menjadi instrumen kunci dalam memperkuat sumber pembiayaan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Dengan demikian, ketiga instrumen tersebut menimbulkan perdebatan yang cukup rumit. Di satu pihak, utang dan investasi asing bisa mendorong pembangunan ekonomi melalui pemberian modal, transfer teknologi, dan pembuatan lapangan kerja. Namun di sisi lain, ketergantungan berlebihan terhadap dana luar negeri bisa menyebabkan kerentanan ekonomi dan politik, seperti

defisit anggaran yang terus-menerus, ketimpangan dalam distribusi manfaat, serta risiko terjebak dalam utang. Hal serupa juga terjadi pada bantuan luar negeri yang sering kali melibatkan kepentingan pemberi bantuan, sehingga memengaruhi kebijakan dalam negeri penerima. Meski banyak tantangan, kerja sama global tetap membuka peluang besar bagi negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan memperluas ruang kerja sama internasional. Dengan pengelolaan utang yang hati-hati, kebijakan investasi yang berkeadilan, serta pemanfaatan bantuan luar negeri yang transparan, negara berkembang dapat menjadikan kemitraan global sebagai instrumen penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Kajian Teori**

Pembangunan nasional adalah proses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut Sukirno (2011), pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita secara bertahap, sekaligus meningkatkan struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi internasional, pembangunan nasional tidak dapat terlepas dari hubungan dan kerja sama dengan negara lain. Oleh karena itu, kemitraan global menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya tahan ekonomi dalam negeri. Bappenas (2020) menjelaskan bahwa kemitraan global, seperti yang diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 17), berperan penting dalam memperkuat kerja sama antar pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, kemitraan global tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Dalam perspektif teori ketergantungan, seperti dijelaskan oleh Gunawan Sumodiningrat (2002), ketergantungan pada modal asing, utang luar negeri, dan bantuan internasional bisa menimbulkan risiko ekonomi dan politik jika tidak dikelola secara mandiri. Pandangan ini diperkuat oleh Sri-Edi Swasono (2016) yang menilai bahwa globalisasi ekonomi dan kerja sama internasional seringkali menciptakan ketimpangan, di mana negara berkembang berada dalam posisi subordinat dibanding negara maju. Oleh karena itu, kemitraan internasional harus didasarkan pada prinsip kemandirian, kesetaraan, dan keadilan agar tidak menciptakan ketergantungan struktural yang melemahkan kedaulatan ekonomi negara. Dalam konteks investasi, Sadono Sukirno (2013) menjelaskan bahwa investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan fasilitas produksi yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi di masa depan. Investasi asing langsung (FDI) dapat memberikan manfaat positif bagi pembangunan, terutama dalam menyediakan modal, menciptakan lapangan kerja, dan mentransfer teknologi.

Namun, Tambunan (2011) menekankan bahwa manfaat investasi asing hanya akan maksimal apabila terdapat mekanisme pengawasan yang kuat, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta kesetiaan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Tanpa pengelolaan yang baik, investasi bisa menyebabkan ketimpangan sosial dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Sementara itu, teori bantuan luar negeri menyoroti peran bantuan internasional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Boediono (1992) menyatakan bahwa bantuan luar negeri dapat memberikan solusi untuk mengatasi ketimpangan antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi. Namun, efektivitas bantuan sangat bergantung pada tata kelola dan cara pemanfaatannya. Kementerian Keuangan RI (2021) menegaskan bahwa bantuan luar negeri seharusnya dialokasikan untuk kegiatan produktif yang mendukung transformasi ekonomi dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang kuat agar utang dan bantuan tidak menyebabkan beban keuangan yang terlalu besar di masa depan. Konsep kemitraan pembangunan juga menjadi dasar teori penting dalam pembahasan ini. Bappenas (2018) menjelaskan bahwa kemitraan pembangunan didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan berkelanjutan. Kemitraan tidak hanya bisa dilihat sebagai hubungan antara pemberi bantuan dan penerima, tetapi lebih tepat dianggap sebagai kerja sama strategis antar berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan untuk mencapai SDGs. Pendekatan ini menjadikan kerja sama internasional sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas nasional, memperluas akses dana, serta mendorong inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Selain itu, teori kelembagaan menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan global sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan kemampuan lembaga-lembaga nasional. Mubyarto (2000) menekankan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai kerakyatan dan kelembagaan yang kuat agar manfaat dari kerja sama internasional bisa dirasakan semua pihak.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang utang luar negeri, investasi, dan bantuan dari luar negeri dalam konteks pembangunan ekonomi dan kerja sama global telah banyak dilakukan oleh para peneliti di Indonesia. Hasil penelitian ini memberi gambaran nyata mengenai peluang dan tantangan dalam membangun kerja sama internasional untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, penelitian oleh Suryahadi dan Hadiwidjaja (2019) dari SMERU Research Institute menunjukkan bahwa bantuan luar negeri penting untuk memperkuat kemampuan daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kemiskinan. Namun, efektivitas bantuan tergantung pada kemampuan pemerintah

daerah dalam mengelola program secara transparan dan melibatkan masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa kerja sama internasional hanya akan berhasil jika ada manajemen yang baik baik di tingkat nasional maupun daerah. Kedua, Tambunan (2011) dalam bukunya "Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan di Era Globalisasi" menyatakan bahwa investasi asing langsung (FDI) memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal menciptakan pekerjaan dan transfer teknologi. Namun, manfaat positif dari FDI hanya muncul ketika investasi itu berada di sektor produktif dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang menjaga kepentingan ekonomi dalam negeri. Jadi, investasi asing bisa jadi peluang pembangunan jika diatur dengan prinsip keberlanjutan. Ketiga, penelitian Kementerian Keuangan Indonesia (2021) dalam Buku Putih Pembiayaan Pembangunan Nasional menyimpulkan bahwa utang luar negeri dan bantuan internasional masih dibutuhkan untuk menutup kesenjangan biaya pembangunan. Namun, Kemenkeu menekankan bahwa penggunaan utang harus memperhatikan aspek keberlanjutan keuangan dan risiko utang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fokus utang sebaiknya dialihkan dari penggunaan untuk konsumsi ke penggunaan yang produktif agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keempat, penelitian Sihombing (2020) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Indonesia menganalisis hubungan antara utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1990–2018. Temuan menunjukkan bahwa utang luar negeri positif membantu pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi bisa jadi beban jika rasio utang terhadap PDB melebihi batas aman. Artinya, pengelolaan utang dengan bijak itu penting agar kerja sama finansial internasional tidak menyebabkan ketergantungan fiskal. Kelima, Bappenas (2020) melalui Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia menekankan pentingnya kerja sama global (SDG 17) untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dan antarnegara. Laporan ini menunjukkan bahwa bantuan luar negeri dan investasi asing memberikan kontribusi nyata terutama dalam bidang energi bersih, infrastruktur, dan kesehatan. Namun, Bappenas juga menyoroti tantangan seperti kesenjangan koordinasi antarlembaga dan keterbatasan data mengenai pembiayaan pembangunan berkelanjutan. keenam, Sri Edi Swasono (2016) dalam bukunya Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia menjelaskan bahwa kerja sama ekonomi internasional hanya akan memberi manfaat bila digunakan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa. Menurutnya, terlalu bergantung pada utang dan investasi dari luar negeri bisa mengurangi kendali ekonomi negara, sehingga kerja sama global harus dilakukan dalam kerangka ekonomi kerakyatan dan di dasari nilai-nilai Pancasila.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemitraan global melalui utang, investasi, dan

bantuan luar negeri memiliki dua sisi utama. Pertama, sebagai peluang bagus untuk memperkuat kemampuan pembangunan nasional. Kedua, sebagai risiko jika tidak diatur dengan baik dan tidak mengedepankan prinsip kemandirian ekonomi. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meninjau kembali bagaimana Partnership for the Goals bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan kuantitatif deskriptif dan asosiatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis persepsi responden tentang peran Partnership for the Goals (juga dikenal sebagai kemitraan global) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui instrumen ekonomi seperti utang luar negeri, investasi asing, dan bantuan luar negeri. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mengukur secara objektif hubungan antarvariabel melalui data numerik. Dilakukan di Kota Medan, penelitian ini melibatkan responden yang terkait dengan kebijakan pembangunan, ekonomi, dan kolaborasi global. Responden termasuk pegawai pemerintah, akademisi, mahasiswa ekonomi, dan praktisi pembangunan. Penelitian ini melibatkan semua orang yang memahami atau terlibat dalam masalah kemitraan global dan pembiayaan pembangunan Kota Medan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti sampel dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, karena populasi sangat luas. Sebagai bagian dari kriteria responden, mereka harus memiliki pendidikan ekonomi, pembangunan, atau kebijakan publik. Mereka juga harus mengetahui atau terlibat dalam masalah investasi, utang, dan kerja sama pembangunan. Penelitian ini mengumpulkan 23 responden.

Kemudian kami juga menggunakan data sekunder dan tinjauan literatur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, jurnal akademik, laporan lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, IMF, dan OECD, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Semua sumber dipilih secara selektif untuk memastikan relevansi dan validitas data terhadap permasalahan yang dikaji. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan deskriptif, yaitu dengan menafsirkan data secara sistematis untuk menemukan pola hubungan antara instrumen pembiayaan global dan pembangunan berkelanjutan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Partnership For The Goals (SDG 17)**

Upaya kolaboratif untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial semakin penting di tengah berbagai tantangan global, seperti ketidakstabilan ekonomi dan krisis iklim. Salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah SDG 17, yang menekankan betapa pentingnya kerja sama global yang kuat dan inklusif untuk mengatasi masalah global seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. SDG 17 telah menjadi pusat perhatian dalam diskusi tentang pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Ini karena kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi sangat penting untuk menciptakan solusi inovatif yang mendukung tercapainya agenda 2030 dalam dunia yang semakin terhubung. Laporan dari Program Pembangunan Internasional menyatakan bahwa dunia masih menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam sumber daya keuangan, teknologi, dan kapasitas institusional untuk mencapai seluruh tujuan SDG. Sebagai contoh, negara-negara berkembang seringkali tidak memiliki akses ke pendanaan dan teknologi terbaru yang diperlukan untuk menangani masalah global seperti energi bersih dan perubahan iklim. Akibatnya, mereka membutuhkan kolaborasi internasional yang erat, termasuk dalam perundingan tentang Semua tujuan SDG, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketimpangan (SDG 10), dan tindakan terhadap perubahan iklim (SDG 13), membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di berbagai level. Oleh karena itu, SDG 17 menjadi landasan kuat yang memungkinkan pemangku kepentingan di seluruh dunia bekerja sama satu sama lain melalui kerja sama teknis, keuangan, kemampuan, dan informasi.

### **Definisi dan Peran Utang, Investasi, dan Bantuan Luar Negeri**

Utang luar negeri adalah nama untuk semua pinjaman resmi, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset negara, menurut Todaro dan Smith (2020). Pendanaan pembangunan dapat berasal dari utang luar negeri. Ketiadaan rencana pengeluaran, kekurangan dana untuk investasi, dan kekurangan dana saat ini adalah tiga kekurangan pendukung yang dapat ditutupi dengan utang luar negeri. Dalam perspektif ekonomi makro, rumus pertumbuhan adalah  $Y = C + I + G + (X - M)$ , di mana pengeluaran pemerintah ( $G$ ), yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan utang luar negeri, adalah komponen yang diperlukan. Utang luar negeri secara langsung berperan dalam pembangunan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah dapat mengelola utang luar negeri dengan benar dan menghindari risiko moral, negara penerima akan mendapat manfaat dari dana tersebut. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi

kemiskinan. Menurut teori pembangunan Harrod-Domart, pertumbuhan ekonomi memerlukan pembentukan modal, atau investasi. Modal yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa atau meningkatkan permintaan publik didefinisikan sebagai modal. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal memungkinkan investasi domestik dan asing di Indonesia. Menurut ayat 4 Pasal 1, "investasi asing", juga dikenal sebagai "penanaman modal asing", adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, baik dengan modal asing sepenuhnya maupun dengan modal dalam negeri yang berpatungan. Menurut Sarwendi, investasi asing adalah perpindahan arus modal internasional di mana sumber daya ditransfer ke negara lain untuk mendirikan atau memperluas bisnis sambil mempertahankan kontrol atas perusahaan di luar negeri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat penting bagi negara berkembang adalah utang sebagai instrumen pembangunan. Namun, hasil penelitian tentang dampak utang terhadap pembangunan ekonomi bervariasi. Studi lain menemukan bahwa utang luar negeri menjadi salah satu komponen yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang, tetapi studi lain menemukan bahwa utang luar negeri justru telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang. Banyak negara sedang berkembang (NSB) telah terjebak dalam perangkap utang, atau perangkap utang, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran ketergantungan utang. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan kembali pentingnya utang luar negeri untuk pembiayaan negara berkembang. Sebenarnya, peran hutang luar negeri dalam kemajuan ekonomi Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Namun, pada pemerintahan orde baru, itu menjadi salah satu strategi politik untuk memperbaiki ekonomi yang tidak stabil yang diwariskan oleh pemerintahan orde lama. Peran World Bank sebagai lembaga donor yang memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang memengaruhi sejarah perkembangan hutang luar negeri Indonesia. Sejak pemerintahan Orde Baru hingga saat ini, tingkat ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri tidak pernah berkurang, bahkan meningkat pesat setelah krisis ekonomi 1997-1998, ketika pemerintah harus membuat utang baru yang besar dari IMF untuk membiayai pemulihan ekonomi. Utang luar negeri dibutuhkan terutama untuk membiayai defisit investasi dan beberapa bagian dari sisi pengeluaran pemerintah di dalam APBN selama masa pemerintahan Soeharto. Sampai tahun 1997, pembangunan Indonesia selalu mendapat pujian dari lembaga keuangan internasional. Bahkan dalam laporan Bank Dunia pada bulan Juni 1997, Indonesia digambarkan sebagai negara yang pertumbuhannya luar biasa atau negara keajaiban. Sebelum Orde Baru berakhir, Bank Dunia selalu memuji kemajuan ekonomi Indonesia. Meskipun Indonesia

dianggap sebagai salah satu negara berkembang yang maju dalam pembangunan ekonominya, kemajuan tersebut telah merusak dan menghabiskan sumber daya alamnya, dan membuat Indonesia utang luar negeri yang besar. Di antara negara ketiga, utang luar negeri Indonesia menempati peringkat kelima, di belakang Meksiko, Brazil, India, dan Argentina. Akibat krisis ekonomi yang sangat parah ini, Indonesia sekarang memiliki rasio stock utang per GDP tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara seperti Meksiko, Brazil, dan Argentina, yang sebelumnya dikenal sebagai pengutang terbesar. Jumlah utang pemerintah pusat dalam rupiah meningkat setiap tahun, menurut data Departemen Keuangan. Data terbaru dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan utang luar negeri Indonesia mencapai US\$ 360,7 miliar atau sekitar Rp 5.410 triliun (US\$ 1 = Rp 15.000). Ini meningkat sekitar US\$ 17,56 miliar atau Rp 263,4 triliun dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Tekanan dan eksploitasi oleh negara-negara maju menyebabkan keterbelakangan negara-negara berkembang. Negara maju menggunakan bantuan luar negeri dan hutang luar negeri untuk menguasai negara berkembang. Selain itu, Negara Indonesia mengalami kondisi ini karena jumlah hutang mereka yang membengkak. Akibatnya, kedaulatan ekonomi mereka menjadi kurang leluasa karena harus mematuhi agenda ekonomi yang disodorkan oleh negara-negara donor sebagai syarat untuk mendapatkan kucuran hutang luar negeri baru. Negara kreditor sering memberikan bantuan kepada Negara debitor karena alasan lain selain ekonomi, seperti untuk melindungi wilayah atau memerangi ideologi tertentu. Dalam perang dingin, blok NATO dan pakta Warsawa berperang untuk pengaruh dengan memberikan pinjaman ke negara-negara sekutu.

Terutama di negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya fiskal terbatas, utang luar negeri dianggap sebagai salah satu cara penting untuk mendorong pertumbuhan. Ketika penerimaan negara dari pajak, ekspor, dan sumber domestik lainnya tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan pembangunan, utang dapat berfungsi sebagai alat pembiayaan alternatif. Pertama, proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, energi, pendidikan, dan transportasi dapat dibiayai melalui utang. Memiliki infrastruktur yang memadai akan meningkatkan produktivitas, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini, utang merupakan modal awal untuk pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, bukan hanya beban. Kedua, utang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Pinjaman luar negeri digunakan oleh negara untuk menjaga likuiditas, menopang cadangan devisa, dan menstabilkan nilai tukar dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, utang menjadi alat penting untuk menjaga stabilitas pembangunan domestik dan menjaga kepercayaan pasar global. Ketiga, utang mungkin berpotensi meningkatkan kerja sama internasional. Negara berkembang dapat

memperoleh akses pada sumber daya keuangan, teknologi, dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik melalui pinjaman yang bersyarat lunak atau hibah dari lembaga multilateral. Ini sejalan dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama poin ke-17, yang berbicara tentang Partnerships for the Goals, yang menekankan betapa pentingnya bekerja sama dengan orang di seluruh dunia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Manfaat utang sebagai instrumen pembangunan, bagaimanapun, hanya dapat dicapai apabila pengelolaannya dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan yang cermat. Jika utang dikelola dengan baik dan dialokasikan ke sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan dan tidak digunakan untuk konsumsi jangka pendek, itu akan sangat menguntungkan. Sebaliknya, utang dapat menjadi beban yang membatasi ruang fiskal dan menimbulkan ketergantungan ekonomi.

### **Perbandingan antara Kontroversi dan Peluang**

Dalam konteks Partnerships for the Goals (SDGs) poin ke-17, masalah utang, investasi, dan bantuan luar negeri adalah pilar utama dalam kerja sama internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, ketiga komponen ini selalu menghasilkan dua belah pihak yang berbeda: kontroversi dan peluang.

#### **a Utang**

Pada utang luar negeri, negara penerima dianggap terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri sehingga menimbulkan beban bunga yang mempersempit ruang fiskal, yang menyebabkan kontroversi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan struktural terhadap negara donor dan lembaga internasional, bahkan menimbulkan tuduhan tentang adanya praktik "neo-kolonialisme" ekonomi. Neo-kolonialisme adalah jenis penjajahan baru di bidang ekonomi di mana negara maju atau lembaga internasional mengontrol negara berkembang melalui utang, investasi, atau bantuan, yang menciptakan ketergantungan dan membatasi kemandirian ekonomi negara berkembang. Namun, utang internasional juga membawa peluang besar. Pinjaman ini dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang yang memiliki sumber pembiayaan domestik yang terbatas untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Utang sebenarnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang jika dikelola dengan benar dan akuntabel.

#### **b Investasi Asing**

Investasi asing menimbulkan masalah. Kontroversial, investasi asing sering dianggap sebagai ancaman karena memungkinkan pihak asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam serta menimbulkan perbedaan keuntungan antara investor dan masyarakat lokal. Investasi asing dapat melemahkan kedaulatan ekonomi negara penerima, bahkan jika ada regulasi yang lemah.

Sebaliknya, investasi asing membuka peluang strategis seperti penciptaan pekerjaan baru, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing industri domestik. Investasi asing dapat mempercepat transformasi ekonomi menuju pembangunan yang inklusif jika diatur dengan regulasi yang jelas dan adil.

### **c Bantuan Luar Negeri**

Tidak lepas dari kontroversi, meskipun sering dianggap sebagai bentuk solidaritas global. Kadang-kadang, bantuan disertai dengan syarat-syarat politik dan ekonomi, yang justru membatasi kemampuan negara penerima untuk bergerak. Bantuan juga sering dipertanyakan, terutama jika tidak sampai ke orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Bantuan luar negeri masih merupakan peluang penting, terutama dalam menghadapi bencana alam, krisis kemanusiaan, atau pandemi global. Selain itu, bantuan ini membantu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan hubungan diplomatik antar negara.

### **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung**

Dalam konteks kolaborasi untuk tujuan: utang, investasi, dan bantuan luar negeri, terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang menentukan sejauh mana utang, investasi, dan bantuan luar negeri dapat berkontribusi pada peningkatan pembangunan berkelanjutan. Seringkali, penghalang berasal dari sumber internal maupun eksternal. Ketergantungan ekonomi terhadap pinjaman atau bantuan luar negeri adalah salah satu tantangan terbesar dari sisi internal. Banyak negara berkembang kesulitan membiayai pembangunan dengan sumber domestik mereka, jadi mereka membutuhkan dukungan internasional. Namun, ketika ketergantungan menjadi terlalu besar, negara penerima kehilangan kemandirian kebijakannya dan menjadi rentan terhadap tekanan dari luar. Selain itu, kondisi ekonomi dan politik yang biasanya melekat pada utang, investasi, dan bantuan internasional juga menjadi penghambat yang signifikan. Misalnya, bantuan dari negara lain sering dikaitkan dengan persyaratan reformasi tertentu, sementara investasi dari negara lain dapat menuntut kemudahan regulasi yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi bangsa. Selain itu, lemahnya tata kelola dan praktik korupsi yang masih menjadi masalah di beberapa negara berkembang merupakan hambatan tambahan. Jika tidak ada transparansi dan akuntabilitas, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru bocor ke orang atau kelompok tertentu. Hal ini tidak hanya menyebabkan perbedaan yang semakin besar, tetapi juga menyebabkan tujuan kolaborasi internasional tidak tercapai. Selain itu, ketidakadilan dalam distribusi manfaat merupakan penghalang yang signifikan. Investasi asing seringkali lebih menguntungkan pihak investor daripada masyarakat lokal. Seringkali, resistensi sosial muncul sebagai akibat eksploitasi

sumber daya alam tanpa mempertimbangkan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, kekurangan kapasitas sumber daya manusia menghambat investasi, utang, dan bantuan luar negeri. Negara penerima sulit mengambil manfaat dari kerja sama internasional karena kekurangan ahli dalam manajemen, teknologi, dan keuangan.

Meskipun demikian, ada juga elemen pendukung yang dapat meningkatkan peran kolaborasi internasional dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejak penetapan Sustainable Development Goals (SDGs), komitmen kerja sama internasional semakin meningkat. Negara berkembang dapat memperoleh pendanaan global dalam bentuk pinjaman lunak, hibah, dan investasi yang ditujukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berkat komitmen ini. Kebijakan dan aturan pemerintah yang kuat juga sangat membantu. Dana dari luar negeri dapat digunakan secara tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan bangsa jika dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Sumber daya manusia yang produktif dan sumber daya alam yang melimpah di negara berkembang juga menarik investor asing. Potensi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan bijak. Selain itu, investasi asing dapat memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan, yang akan meningkatkan produktivitas dan memperkuat kapasitas domestik dalam jangka panjang. Faktor tambahan adalah dukungan diplomasi dan kemitraan global yang semakin erat. Dengan diplomasi yang efektif, negara berkembang dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi dengan negara donor dan investor, sehingga kerja sama yang terjalin menjadi lebih adil, seimbang, dan menguntungkan satu sama lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka Kerjasama untuk Tujuan, elemen yang menghambat dan mendukung utang, investasi, dan bantuan luar negeri bekerja sama. Melalui reformasi kebijakan dan penguatan institusi domestik, hambatan seperti ketergantungan, syarat politik, ketidakadilan distribusi manfaat, dan keterbatasan kapasitas SDM harus diatasi. Sebaliknya, komitmen global, regulasi yang kuat, transfer teknologi, dukungan diplomasi, dan peluang sumber daya harus dimaksimalkan. Utang, investasi, dan bantuan asing dapat membantu mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan jika negara mampu mengurangi penghalang dan mengoptimalkan dukungan.

### **Analisis Studi Kasus**

Penelitian ini menemukan dinamika lain yang lebih mendasar timbulnya konflik kepentingan di antara para aktor pembangunan internasional setelah menguraikan berbagai komponen pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kemitraan global. Hubungan antara negara donor dan penerima bantuan luar negeri (Official Development Assistance, atau ODA) seringkali tidak

seimbang sesuai dengan prinsip kemitraan yang digariskan dalam Partnership for the Goals. Ini adalah salah satu konflik yang paling menonjol.

Bantuan luar negeri atau bantuan pembangunan resmi (ODA) adalah sumber konflik yang muncul selama pelaksanaan Kolaborasi untuk Tujuan (SDGs ke-17). Melalui pendanaan, pelatihan, dan transfer teknologi, ODA dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di negara berkembang. Namun, dalam praktiknya, bantuan luar negeri seringkali digunakan sebagai alat ekonomi dan politik negara donor, yang menghasilkan hubungan yang tidak seimbang antara pemberi dan penerima bantuan. Data dari OECD (2023) menunjukkan bahwa ODA global mencapai sekitar USD 223 miliar, dengan sebagian besar diberikan kepada negara-negara Asia-Pasifik. Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak menerima bantuan luar negeri; lembaga seperti Japan International Cooperation Agency (JICA), United Nations Development Programme (UNDP), dan Asian Development Bank (ADB) rata-rata memberikan bantuan sebesar USD 1,6 miliar setiap tahun. Meskipun bantuan ini membantu beberapa bidang, seperti energi, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ada konflik kepentingan dan ketidaksesuaian prioritas pembangunan antara negara penerima dan negara pemberi bantuan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Rahmadani (2021), sekitar 38% program bantuan luar negeri di Indonesia masih digerakkan oleh donor. Ini berarti bahwa lembaga pemberi bantuan atau negara donor lebih banyak bertanggung jawab atas desain dan pelaksanaan program daripada pemerintah Indonesia sendiri. Ini menghasilkan proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan lokal, seperti pelatihan yang tidak berkelanjutan atau pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Selain itu, bantuan dari negara lain seringkali disertai dengan syarat kebijakan yang dikenal sebagai kondisi kebijakan. Misalnya, ketika negara-negara Barat menawarkan bantuan, mereka sering menuntut penerapan aturan tata kelola tertentu, liberalisasi pasar, atau kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi global. Ini mengganggu otoritas nasional dan tekanan internasional. Utami (2022) menjelaskan bahwa "bantuan luar negeri dapat berubah menjadi instrumen kontrol yang halus, di mana negara penerima dipaksa menyesuaikan kebijakannya agar tetap dapat mendapat akses pada sumber dana global." Dari perspektif politik ekonomi, bantuan luar negeri juga sering digunakan sebagai sarana diplomasi atau kekuatan halus. Negara donor memanfaatkan dana bantuan luar negeri (ODA) untuk meningkatkan pengaruh geopolitiknya di wilayah tertentu.

Contohnya, Jepang menggunakan program pinjaman ODA Jepang untuk meningkatkan

hubungan ekonomi di Asia Tenggara, sementara Tiongkok menggunakan bantuan dan investasi untuk memperluas jangkauan strategisnya melalui Belt and Road Initiative (BRI). Dalam situasi seperti ini, kolaborasi untuk tujuan seringkali kehilangan makna aslinya sebagai kolaborasi setara dan berubah menjadi arena persaingan untuk kepentingan negara-negara besar. Secara empiris, penelitian Nugroho dan Fitriani (2023) menunjukkan bahwa konsultan atau kontraktor dari negara donor digunakan untuk sekitar 56% proyek bantuan luar negeri di Indonesia. Oleh karena itu, bukan ekonomi Indonesia yang berkembang, tetapi sebagian besar nilai ekonomi dari bantuan tersebut kembali ke negara pemberi. Ini menunjukkan bahwa program bantuan luar negeri terus menempatkan negara berkembang pada posisi yang pasif dan bergantung daripada membantu pertumbuhan global. Kurang transparansi dan koordinasi antar-lembaga penerima bantuan adalah masalah lain dari sisi sosial dan kelembagaan. Banyak proyek bantuan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah secara terpisah, tanpa dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Akibatnya, bantuan menjadi tidak efektif dan sulit untuk dinilai. Amalia (2023) menekankan bahwa bantuan luar negeri berisiko meningkatkan ketergantungan administratif dan mengurangi kapasitas kelembagaan lokal jika tidak ada sistem pengawasan yang kuat.

Namun, ada peluang besar bahwa bantuan luar negeri dapat dioptimalkan melalui kerja sama. Pencapaian SDGs sangat dipengaruhi oleh bantuan yang diarahkan untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan energi terbarukan, dan penelitian dan inovasi. Untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan saling menguntungkan, model kemitraan baru yang dimulai oleh Bappenas dalam program South-South and Triangular Cooperation (SSTC) dapat menjadi alternatif. Oleh karena itu, konflik ketiga ini menunjukkan bahwa bantuan luar negeri terus menyimpan paradoks penting dalam kolaborasi global: di satu sisi, itu membantu meningkatkan solidaritas internasional, tetapi di sisi lain, itu dapat mempertahankan ketidaksamaan kekuasaan dan ketergantungan struktural negara berkembang terhadap negara maju. agar kolaborasi untuk tujuan dapat berjalan dengan baik untuk memenuhi prinsip keberlanjutan, Indonesia harus memperkuat sistem seleksi dan koordinasi bantuan, memastikan bahwa program sesuai dengan prioritas nasional, dan menegaskan posisinya sebagai mitra sejajar dan bukan sekadar penerima pasif dari bantuan internasional.

Menurut analisis konflik, masalah utama mekanisme bantuan luar negeri (Official Development Assistance/ODA) bukanlah jumlah dana yang diterima, tetapi bagaimana hubungan antara negara donor dan penerima terbentuk. Bantuan luar negeri biasanya diberikan dalam kerangka yang

tampak bekerja sama, tetapi pada kenyataannya menempatkan negara berkembang sebagai pihak yang bergantung daripada mitra seajar. Kesimpangan ini menyebabkan bantuan menjadi kurang efektif dan tujuan Partnership for the Goals menjadi lebih sulit dicapai. Dari perspektif politik ekonomi internasional, hubungan donor-penerima sering diwarnai oleh asimetri kekuasaan. Negara-negara maju menggunakan dana bantuan luar negeri (ODA) untuk meningkatkan kontrol politik, membuka pasar untuk barang-barang mereka, atau mendukung prinsip ekonomi tertentu, seperti liberalisasi dan deregulasi. Para ekonom pembangunan mengusulkan gagasan neo-kolonial ketergantungan, yang berpendapat bahwa mempertahankan dominasi ekonomi global dengan menggunakan ketergantungan finansial. Kecenderungan ini terlihat jelas di Indonesia ketika proyek bantuan disertai dengan syarat kebijakan, seperti menggunakan kontraktor, konsultan, atau teknologi dari negara pemberi pinjaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Utami (2022), bantuan luar negeri seringkali digunakan sebagai alat diplomasi lunak, atau diplomasi lemah, untuk mempertahankan kepentingan ekonomi donor di negara penerima. Misalnya, ketika Jepang memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman lunak untuk proyek infrastruktur strategis, perusahaan Jepang biasanya menjadi pelaksana utama proyek. Akibatnya, sebagian besar manfaat ekonomi kembali ke negara asal dana, sementara negara penerima hanya menerima infrastruktur fisik tanpa meningkatkan kapasitas teknologi domestik mereka secara signifikan. Situasi ini menunjukkan bahwa Kolaborasi Tujuan belum benar-benar memperhatikan nilai kesetaraan, yang merupakan inti dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pola top-down bantuan luar negeri juga menyebabkan program pembangunan lokal terpecah. Banyak proyek bantuan beroperasi secara bersamaan tanpa berkolaborasi dengan rencana pembangunan nasional atau daerah. Akibatnya, ada tumpang tindih program dan pelaksanaan yang tidak efektif. Amalia (2023) menyatakan bahwa kurangnya koordinasi ini menunjukkan bahwa lembaga masih tidak mampu memasukkan program bantuan ke dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia. Hal ini menyebabkan sumber daya terbuang, pengawasan yang buruk, dan kegagalan program setelah pendanaan luar negeri berakhir. Bantuan asing tanpa transfer teknologi dan pengetahuan hanya akan menghasilkan ketergantungan jangka panjang dari perspektif keberlanjutan. Karena kekurangan kapasitas lokal, banyak proyek berhenti berjalan setelah dana bantuan habis. Ini bertentangan dengan prinsip pembangunan kapasitas, yang seharusnya menjadi dasar dari kolaborasi pembangunan berkelanjutan. Hanya sekitar 42% proyek bantuan luar negeri di Indonesia memasukkan elemen penguatan kapasitas lokal, menurut Nugroho dan Fitriani (2023). Sementara sisanya berfokus pada hasil fisik tanpa peningkatan kualitas sumber

daya manusia, dan bersifat short-term. Meskipun demikian, konflik ini tidak menunjukkan bahwa bantuan asing tidak memiliki manfaat yang sama. sekali saja. Dalam banyak kasus, dana bantuan negara (ODA) telah membantu mempercepat kemajuan di bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan mitigasi perubahan iklim. Permasalahannya adalah bagaimana mekanisme tata kelola dan negosiasi peran Indonesia dalam menentukan bagaimana dan berapa banyak bantuan yang harus diberikan. Indonesia harus mengambil posisi sebagai mitra strategis dan aktif daripada hanya menerima. Ini dapat dicapai melalui peningkatan diplomasi pembangunan dan peningkatan kapasitas lembaga nasional seperti Bappenas dan Kementerian Luar Negeri untuk mengarahkan, menyeleksi, dan mengevaluasi bantuan sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, model kerja sama Triangular South-South (SSTC) Indonesia mungkin merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk membangun pola bantuan yang lebih setara. Indonesia tidak hanya menjadi penerima dari mekanisme ini, tetapi juga menjadi penyedia bantuan teknis bagi negara berkembang lain dalam bidang tata kelola pemerintahan, pertanian, dan manajemen bencana. Metode ini menegaskan bahwa, daripada bergantung pada ketergantungan, solidaritas dan saling belajar dapat menentukan hubungan antarnegara berkembang.

Oleh karena itu, analisis konflik tersebut menegaskan bahwa bantuan luar negeri harus dikelola sesuai dengan perspektif kemitraan nyata. Negara penerima harus memiliki kemandirian dalam menentukan kebijakan, jalan, dan tujuan pemanfaatan bantuan. Sebuah kolaborasi untuk tujuan hanya akan berhasil jika semua pihak mengadopsi standar transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan. Jika tidak, bantuan dari luar negeri berisiko menjadi alat untuk mengontrol ekonomi global, yang akan menjauhkan negara berkembang dari tujuan kemandirian dan keberlanjutan yang digariskan oleh SDGs. Hasil kuesioner yang dibagikan kepada peserta menunjukkan persepsi mereka tentang utang luar negeri, investasi asing, bantuan luar negeri, dan kemitraan global (SDG 17). Berikut ini adalah beberapa kesimpulan dari kuesioner:

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang menjawab memiliki pandangan positif tentang bagaimana utang luar negeri dapat membantu kemajuan bangsa. Sebanyak 43,5% dari orang yang menjawab setuju, sementara 43,5% lainnya netral terhadap gagasan bahwa utang luar negeri diperlukan untuk pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umumnya menganggap utang sebagai sumber pembiayaan yang penting, tetapi masih ada keraguan tentang ketergantungan jangka panjang. Sebanyak 39,1% responden setuju, dan 39,1% sangat setuju bahwa utang dapat menjadi beban ekonomi jika tidak dikelola secara transparan, yang menunjukkan bahwa kesadaran terhadap risiko moral hazard tinggi. Selain itu, 43,5% responden setuju, dan 17,4% sangat

setuju bahwa penggunaan utang untuk proyek produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, responden menganggap utang luar negeri memiliki manfaat yang signifikan jika dikelola dengan transparan dan digunakan untuk kegiatan produktif.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang menjawab menilai investasi asing sebagai hal yang penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sebanyak 47,8% setuju, dan 13% sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, sekitar 52,2% orang yang menjawab juga setuju bahwa investasi asing dapat menyebabkan dominasi ekonomi oleh pihak luar, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan ketidakseimbangan dan pengaruh asing yang berlebihan. Di sisi lain, sebagian besar orang yang menjawab tidak setuju dengan pernyataan ini. Oleh karena itu, terlihat bahwa masyarakat melihat investasi asing sebagai peluang besar untuk kemajuan. Namun, mereka tetap menekankan betapa pentingnya regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa dampaknya tidak mengganggu kemandirian ekonomi nasional.

Sebagian besar orang yang menjawab (56,5%) setuju, dan 17,4% sangat setuju bahwa bantuan luar negeri membantu negara berkembang melaksanakan program pembangunan. Namun, 56,5% responden setuju bahwa kepentingan politik negara pemberi kerap disertai dengan bantuan luar negeri. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap potensi ketergantungan dan pengaruh asing yang dapat muncul dari bantuan tersebut. Sementara itu, 43,5% responden setuju dan 52,2% sangat setuju bahwa pemerintah harus memastikan bahwa pemanfaatan bantuan luar negeri sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa responden cenderung mendukung bantuan luar negeri; namun, mereka menekankan bahwa pengawasan yang ketat, transparan, dan penyesuaian dengan kebutuhan nasional diperlukan untuk memaksimalkan manfaatnya.

Responden secara umum berpendapat bahwa kerja sama global sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 56,5% orang yang menjawab menyatakan setuju dan 21,7% sangat setuju bahwa kerja sama global sangat penting untuk memperkuat kolaborasi pembangunan antarnegara. Mereka juga setuju dengan aspek peluang transfer teknologi dan inovasi, dengan 56,5% orang yang menjawab setuju dan 17,4% sangat setuju. Namun, 47,8% orang yang menjawab setuju dan 39,1% sangat setuju bahwa ketergantungan pada dana asing dapat menghambat kemandirian ekonomi negara. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung bentuk kemitraan global yang adil dan menguntungkan, tetapi juga menekankan bahwa kemandirian ekonomi dalam negeri sangat penting. Oleh karena itu, kemitraan global dilihat sebagai alat strategis yang dapat membantu pembangunan, asalkan dilakukan dengan cara yang adil dan tidak

menciptakan ketergantungan baru.

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan struktur kekuasaan dan kepentingan antara negara donor dan penerima adalah penyebab utama konflik dalam mekanisme bantuan luar negeri (Official Development Assistance/ODA) dalam konteks Kerja Sama untuk Tujuan (SDGs ke-17). Negara maju sering menggunakan bantuan sebagai alat politik, ekonomi, atau bahkan diplomasi lunak (soft power) daripada seharusnya menjadi sarana solidaritas global. Dalam hal Indonesia, bantuan asing telah mendorong kemajuan di berbagai bidang, seperti pendidikan, energi, dan ketahanan iklim. Namun, ketergantungan administratif, kurangnya koordinasi lembaga, dan kurangnya pengawasan terhadap keberlanjutan dan relevansi program bantuan sering menghambat kinerjanya. Sebagian besar program bantuan tidak memenuhi kebutuhan nasional karena pola hubungan yang masih berpusat pada donor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam kemitraan global tidak hanya berkaitan dengan pendanaan, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setiap bentuk bantuan luar negeri adil, independen, dan bertanggung jawab. Tanpa perubahan perspektif, bantuan internasional berisiko mempertahankan ketergantungan struktural, yang justru menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara mandiri.

## **REKOMENDASI DAN SOLUSI**

Untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaan bantuan luar negeri, diperlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kelembagaan nasional, terutama Bappenas dan kementerian terkait, untuk mengatur semua bantuan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan bahwa setiap proyek bantuan benar-benar berdampak pada masyarakat, penguatan koordinasi ini sangat penting. Selain itu, sistem pelaporan publik yang terbuka harus digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat mengetahui aliran dana bantuan serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Langkah ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan pengawasan terhadap efektivitas bantuan. Sebaliknya, untuk memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi dengan negara donor dan lembaga internasional, Indonesia juga harus meningkatkan kemampuan diplomasi pembangunan. Metode diplomasi ini harus didasarkan pada prinsip kemanfaatan bersama dan kepemilikan nasional, yang berarti bahwa setiap bantuan dari luar negeri harus benar-benar mendukung kebutuhan dan keinginan nasional

daripada hanya mengikuti agenda donor. Untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya menghasilkan hasil fisik proyek, tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang berkelanjutan, setiap bentuk bantuan harus dikombinasikan dengan transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas lokal.

Selain memperkuat mekanisme domestik, Indonesia dapat memperluas perannya melalui kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular Cooperation (SSTC), yang merupakan bentuk kerja sama yang lebih setara. Indonesia tidak hanya bertindak sebagai penerima bantuan melalui inisiatif ini, tetapi juga bertindak sebagai penyedia bantuan teknis bagi negara berkembang lainnya. Metode ini mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara maju dan meningkatkan persepsinya sebagai mitra sejajar dalam sistem pembangunan global. Indonesia memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan antara donor dan penerima menjadi kemitraan yang adil dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip kesetaraan, transparansi, dan kemandirian dalam setiap bentuk bantuan yang diberikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, D. F. (2018). *Diplomasi pembangunan Indonesia dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Laporan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dewi, R. K., & Hidayat, M. (2021). Efektivitas bantuan luar negeri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 145–160.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Buku putih pendanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Mulyasari, J. (2023). Kemitraan global dan tantangan ketimpangan ekonomi: Kajian terhadap SDGs ke-17 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Nasional*, 18(1), 55–70.
- Nurhadi, A. (2019). Ketergantungan dan kedaulatan ekonomi dalam skema bantuan pembangunan internasional. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(2), 87–101.
- Sari, N. P., & Wibowo, A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan luar negeri di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 201–215.
- Susanti, L. (2021). Kebijakan bantuan luar negeri dan diplomasi ekonomi Indonesia: Antara

***Partnership For The Goals: Utang, Investasi, dan Bantuan Luar Negeri (Kontroversi dan Peluang)***

*Islah Sahbana Kudadiri*<sup>1</sup>, *Rahmi Sekar Andhini*<sup>2</sup>, *Syarifah Hannum Pohan*<sup>3</sup>

- kepentingan nasional dan *global governance*. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 12(1), 33–49.
- Adiningsih, S. (2018). *Kebijakan ekonomi makro di era globalisasi: Tantangan dan peluang bagi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basri, M. C. (2020). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan peluang di era globalisasi*. Jakarta: Kompas.
- Bappenas. (2020). *Laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Fitriani, E. (2021). *Diplomasi pembangunan dan kemitraan global: Analisis implementasi SDGs di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, S. (2019). *Hubungan ekonomi internasional: Teori dan praktik dalam konteks Indonesia*. Malang: UB Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan utang luar negeri dan pembiayaan pembangunan nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Kusumaningrum, D. (2021). *Analisis peran investasi asing langsung terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 22(2), 145–160.
- Lestari, N. P. (2020). *Bantuan luar negeri dan ketergantungan ekonomi: Studi terhadap efektivitas ODA di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 17(1), 55–70.
- Mulyasari, J. (2022). *Kebijakan fiskal dan moneter dalam pembangunan berkelanjutan: Kajian ekonomi makro Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Pertiwi, R. (2023). *Kemitraan global dan kemandirian ekonomi nasional dalam konteks SDGs 2030*. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 5(3), 200–215.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi teori pengantar* (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, T. (2019). *Pembangunan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia: Tantangan menuju SDGs*. Bogor: IPB Press.
- UNDP Indonesia. (2021). *Laporan capaian SDGs Indonesia 2021: Partnership for the Goals (Tujuan ke-17)*. Jakarta: United Nations Development Programme Indonesia.
- World Bank. (2023). *Indonesia Development Update: Supporting Reforms for Sustainable Growth*. Washington, D.C.: The World Bank Group.